

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi BLT-Dana Desa dapat dikaji secara *bottom-up* dengan indikator sebagai berikut:

1. Jaringan Aktor

Berdasarkan analisis aspek jaringan aktor yang terlibat dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi BLT-DD ini melibatkan beberapa aktor yang saling bekerjasama bagi kelancaran implementasi BLT-DD. Yang pertama, Ketua RT untuk melakukan pendataan keluarga miskin yang nantinya diserahkan dan dihimpun oleh ketua RT untuk selanjutnya diberikan kepada desa. selanjutnya, kepala Desa berfungsi sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan program ini di desa, ketua BPD sebagai penanggungjawab dalam mengatur jalannya musyawarah desa dalam menentukan calon KPM, camat sebagai pengawas dan memonitor jalannya BLT-DD. Selain itu, pelaksanaan BLT-DD juga memerlukan peran Babinsa dan Babinkamtibnas sebagai mitra untuk mengamankan jalannya proses penyaluran bantuan kepada keluarga penerima. Meskipun program BLT-DD di Kecamatan Tarub dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun juga terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti adanya miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman program sehingga masih banyak bahkan sebagian warga desa yang tidak memahami prasyarat detail penerimaan BLT-DD, sehingga mereka yang tidak masuk kedalam kategori penerima menanyakan kepada perangkat desa terkait hal tersebut.

2. Jenis Kebijakan

Berdasarkan aspek jenis kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat distributif. Pelaksanaan kebijakan ini mendorong pemerintah di level bawah untuk melaksanakan sendiri program dari pemerintah tersebut. Selain itu, bagi beberapa perangkat desa mereka berpendapat bahwa program BLT-DD sebaiknya tidak berlangsung dalam jangka panjang karena dana desa dapat dialokasikan untuk program pembangunan ekonomi yang lebih produktif.

3. Harapan Masyarakat

Berdasarkan aspek harapan masyarakat dalam kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar/pokoknya di masa pandemi. Dalam hal ini, implementasi BLT-DD di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal bejalan dengan baik dilihat dari masyarakat desa yang merasa terbantu dengan adanya progam ini.

4. Prakarsa Masyarakat

Berdasarkan aspek prakarsa masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam implementasi BLT-DD seperti LSM sangat membantu jalannya proses pelaksanaan dari tahap penetapan KPM sampai pada tahap penyaluran bantuan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasinya dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Berdasarkan aspek jaringan aktor yang terlibat, masalah yang terjadi yaitu kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan BLT sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai SOP implementasi kebijakan. Selain itu, masalah lainnya yaitu minimnya pemahaman masyarakat terhadap program BLT-DD secara keseluruhan. Sehingga untuk kedepannya jika program BLT-DD ini

masih tetap berlangsung perlu adanya upaya untuk mesosialisasikan maksud dan tujuan dari kegiatan terhadap warga dalam skala yang lebih kecil. Sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah terserap dengan jumlah audience yang lebih sedikit.

2. Berkaitan dengan aspek jenis kebijakan yaitu mengenai kelanjutan dari program BLT yang mana anggaran BLT berasal dari Dana Desa yang dinilai kepala desa mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karena itu apabila kebijakan ini akan dilanjutkan sebaiknya pemerintah menganggarkan kembali dana yang akan disalurkan untuk bantuan.
3. Berkaitan dengan aspek harapan masyarakat, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Oleh karena itu program bantuan seperti ini diharapkan dapat berlanjut dengan anggaran bantuan tersendiri untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
4. Berkaitan dengan aspek prakasa masyarakat, keaktifan elemen masyarakat menjadi faktor penting untuk keberhasilan program BLT-DD. Sehingga diharapkan masyarakat dapat terus berperan aktif dalam pelaksanaan proses kebijakan dan ikut membantu pelaksanaan program kebijakan ini ketika nantinya akan diadakan kembali.